



2025



LAPORAN KINERJA

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

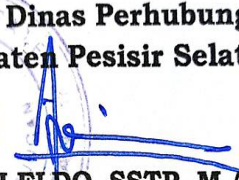
KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi serta rencana kerja yang dibebankan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu tahun 2025. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

LKjIP Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Petunjuk Teknis, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan ini disusun semoga membawa manfaat positif bagi semua pihak dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan di tahun mendatang.

Painan, 09 Februari 2025
**Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Pesisir Selatan**

(ZONI ELDO, SSTP.,M.A)
Nip. 19841008 200312 1 003



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban suatu instansi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya selama kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan. Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sedangkan Dinas Perhubungan menjalankan beberapa fungsi diantaranya yaitu perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan pengkoordinasian serta pelayanan umum di bidang perhubungan.. Adapun yang menjadi tujuan pembangunan bidang perhubungan yang hendak dicapai dalam lima tahun ke depan sebagaimana tersebut dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan 2021 - 2026 adalah : “ *Meningkatnya Keselamatan Transportasi*”.

Dari Tujuan diatas, maka dapat ditentukan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut :

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai adalah :

1. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi indikator Hasil Penilaian AKIP Dinas Perhubungan.
2. Meningkatnya Konektifitas dan Aksebilitas Antar Wilayah. Indikator “Rasio Konektifitas”.
3. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah Indikator “ Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah”

Hasil analisis dan evaluasi dari capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah diukur dalam Bab III, keberhasilan/ kegagalan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

Setelah ditetapkan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan, maka disusunlah Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2025 berikut target dan realisasi kinerja serta anggarannya dapat dilihat pada tabel dibawah :

Sasaran Kinerja	Indikator Sasaran	Target		Realisasi		% Capaian		Efisiensi
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Hasil Penilaian AKIP Dinas Perhubungan	A (89,95)	5.271.342.685	96	5.163.709.101	97,96	84,35	2,04
Meningkatnya kualitas Infrastruktur	Rasio Konektifitas	0,57	12.935.717.709	0,52	12.796.271.066	91,22	98,92	1,07
Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Daerah	87		87		100		

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh alokasi dana APBD sebesar **Rp. 18.207.060.394,-** (*Delapan belas milyar dua ratus tujuh juta enam puluh ribu tiga ratus Sembilan puluh empat rupiah*). Sasaran tersebut dijabarkan dalam 3 (tiga) program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 28 (dua puluh enam) sub kegiatan. Dari hasil evaluasi dan analisis serapan anggaran **sangat baik** karena keberhasilan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun adalah sebesar **Rp. 17.959.980.167,-** (*Tujuh belas milyar Sembilan ratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu serratus enam puluh tujuh rupiah*) atau 98,64%.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 berisi tentang realisasi pencapaian sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026.

Sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang otonomi daerah salah satu urusan wajib yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah adalah urusan wajib di bidang perhubungan, bahwa transportasi sudah merupakan suatu kebutuhan adalah pasti, dan peranannya sangatlah penting dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan. Sebagai penunjang dan penggerak serta pemerata hasil - hasil pembangunan transportasi mutlak harus direncanakan, diatur dan dikendalikan agar dapat berfungsi optimal.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan yang telah disusun merupakan langkah awal dalam menjawab tuntutan perkembangan global dan nasional, dengan serangkaian rencana program kegiatan mendasar yang harus dapat diimplementasikan guna mencapai tujuan menciptakan lalu lintas yang tertib, lancar, aman dan nyaman dalam rangka mendukung dan mendorong

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Tahun 2025 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah ditetapkan dan seharusnya dicapai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Mendorong Dinas Perhubungan di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada Peraturan Perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan terhadap Dinas Perhubungan di dalam pelaksanaan program kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan adalah untuk memberikan gambaran kinerja Instansi Pemerintah yang Transparan, Jelas dan Dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja dinas dengan melakukan perubahan ke arah perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Tupoksi.
2. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.
3. Pertanggungjawaban terstruktur dari pelaksana kepada pimpinan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah :

1. *Aspek Akuntabilitas Kinerja* : bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKJ 2025 sebagai sarana pertanggung jawaban Dinas Perhubungan atas capaian kinerja diperoleh tahun 2025 dan sebagai alat ukur atas keberhasilan capaian kinerja ditetapkan tahun 2025.
 - a. *Aspek Manajemen Kinerja* : bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKJ 2025 sebagai sarana evaluasi pencapaian

kinerja oleh Dinas Perhubungan bagi upaya - upaya perbaikan kinerja di masa datang Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pimpinan atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai Sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dengan demikian Laporan Kinerja sebagai sarana bagi instansi pemerintah dalam menpertanggungjawabkan hasil capaian dan bagaimana proses yang dilewati dalam mencapai target yang telah ditentukan.

1.3 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
- b. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- d. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- e. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 3ndi, terakhir dengan Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
- f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 - i. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - k. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
 - l. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - m. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

1.2.1 Dasar Pembentukan Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan, maka dibentuklah Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah sebagai pembantu Kepala Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan.

1.2.2 Kedudukan , Tugas Pokok dan Fungsi

Menurut Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dimana ruang lingkup pengaturan dalam peraturan Bupati ini meliputi kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

Peraturan ini menjelaskan bahwa Dinas Perhubungan merupakan Dinas pelaksana urusan pemerintahan di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah, dan Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Kabupaten serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas perhubungan mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah;
3. penyelenggaraan administrasi Dinas;
4. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Perhubungan;
5. Dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.2.3. Struktur Organisasi

Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan. Kelembagaan menyangkut aspek

organisasi, Kepegawaian serta sarana dan prasarana. Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Perhubungan, bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan sebagai salah satu OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Kabupaten Pesisir Selatan yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai susunan organisasi dan tata kerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan membawahi 1 sekretariat, 3 bidang yakni:

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Tugas pokok Sekretaris adalah membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dalam urusan umum, urusan perlengkapan, urusan keuangan, urusan kepegawaian, urusan kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi.

Sekretariat, terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Sub Bagian Perencanaan Pelaporan dan Keuangan

2. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pembinaan di bidang lalu lintas kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan bidang lalu lintas, dan dibantu oleh beberapa seksi ::

- a) Kepala Seksi Lalu Lintas
- b) Kepala Seksi Angkutan
- c) Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda

3. Bidang Pengembangan dan Keselamatan

Bidang Pengembangan dan Keselamatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pembinaan di bidang Pengembangan dan Keselamatan kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan bidang Pengembangan dan Keselamatan, dan dibantu oleh :

- a) Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan
- b) Fungsional Lingkungan Perhubungan
- c) Kepala Seksi Keselamatan

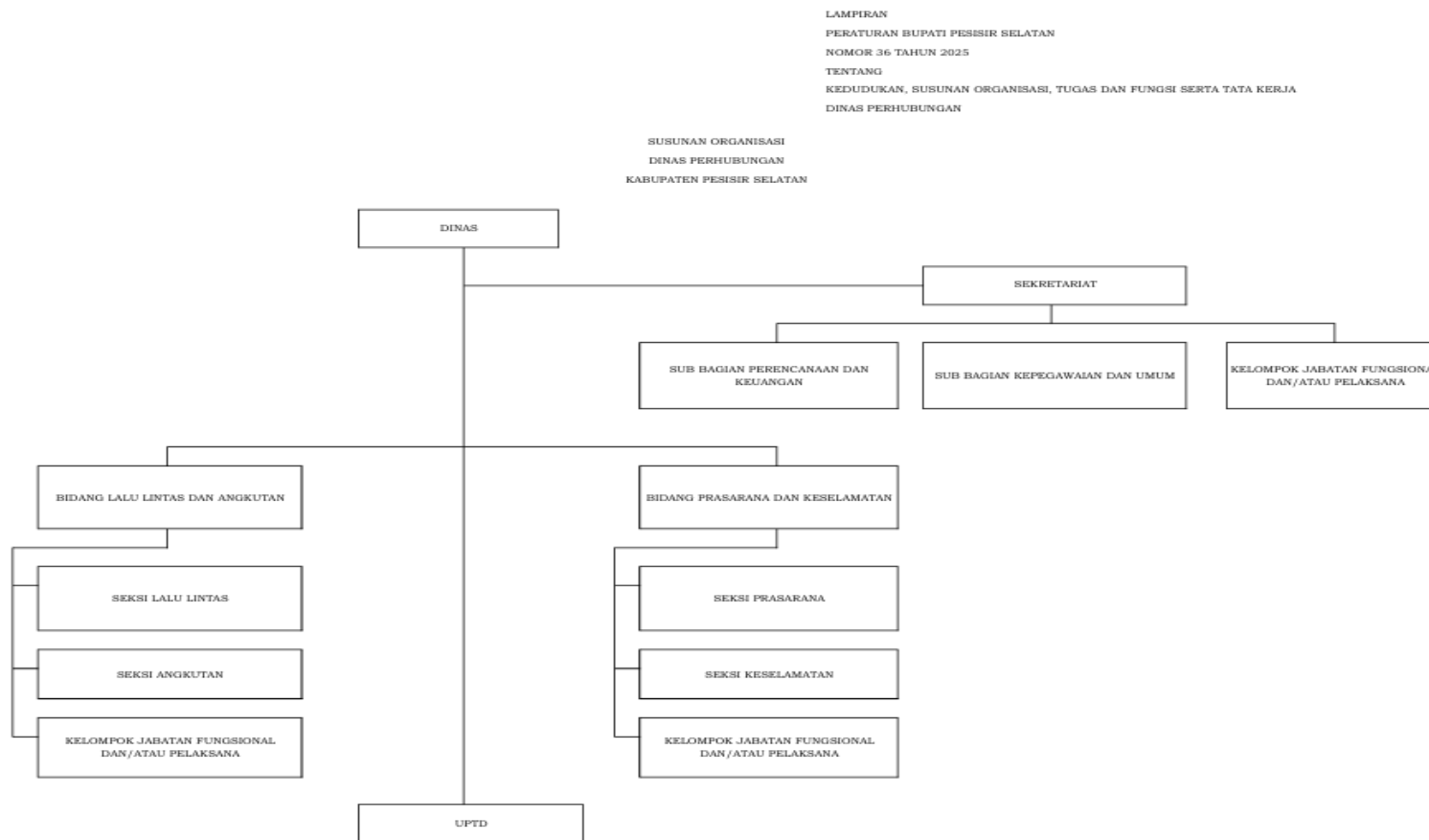
4. Bidang Prasarana

Bidang Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pembinaan di bidang Prasarana kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan bidang Prasarana, dan dibantu oleh :

- a) Fungsional Perencanaan Prasarana
- b) Kepala Seksi Pembangunan Prasarana
- c) Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Org sebaianisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan memiliki struktur Organisasi sebagai berikut :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan:



BUPATI PESISIR SELATAN,

 HENDRAJONI

1.2.4. Sumber Daya Manusia

Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan memiliki Sumber Daya aparatur yang beragam dimana ada PNS, PPPK Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu kondisi 31 Desember 2025 sebanyak 94 (Sembilan puluh empat) orang terdiri dari Perempuan 11 (sebelas) orang atau 11,7% dan laki-laki 83 (delapan puluh tiga) orang atau 88,3% dengan rincian sebagai berikut :

- a. 33 orang PNS
- b. 8 orang PPPK Penuh Waktu
- c. 54 orang PPPK Paruh Waktu

Tabel 1.1
Komposisi PNS, PPPK Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu
Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
Kondisi 31 Desember 2025

NO	GOL	PENDIDIKAN														JUM LAH	
		LAKI – LAKI							PEREMPUAN								
		S-2	S-1	D-IV /D.II I	SL TA	SL TP	S D	JUML AH	S-2	S-1	D-IV /D.II I	SL TA	SL TP	SD	JUM LAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	IV/e IV/d IV/c IV/b IV/a	1 2	1					1 3									1 3
	Jumlah Gol.IV							4									4
2	III/d III/c III/b III/a		3 8 6 7					3 8 6 7		1 1	1						1 1 1 7
	Jumlah Gol.III							24									27
3	II/d II/c II/b II/a		3 1					3 1									3 1
	Jumlah Gol II							4									4
4	I/d I/c I/b I/a																
	Jumlah Gol I																
	Jumlah PTT		10		45			55				9					9
	JUMLAH																95

Berdasarkan analisis beban kerja yang telah dilaksanakan, jumlah PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan kondisi 31 Desember 2025 yang ada masih belum mencukupi kebutuhan ideal, sehingga masih dibutuhkan penambahan pegawai. Untuk membantu pelaksanaan tugas supaya tetap berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya maka dilaksanakan dengan merangkap tugas oleh pegawai yang ada.

1.2.5. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan memerlukan sarana dan prasarana pendukung. Sarana dan prasarana pendukung tersebut antara lain berupa gedung kantor dan kendaraan dinas. Data kendaraan dinas dan gedung kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan keadaan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel 1 dan tabel 3 berikut :

Tabel 1. 2
Sarana Prasarana Dinas Perhubungan
Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Harga (Rp.)
1	Tanah	2	Bidang	497.467.844,-
2	Peralatan dan Mesin	3.022	Unit	10.463.350.749,-
3	Gedung dan Bangunan	43	Unit	3.239.163.996,-
4	Jalan. Irigasi dan Jaringan	191	Buah	24.565.639.815,-
5	Aset lainnya	2	Unit	129.984.000,-

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Pesisir Selatan 2025

1.5 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN PERMASALAHAN UTAMA

1.5.1 Apek Strategis Organisasi

Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan memiliki beberapa aspek strategis yang penting untuk diperhatikan dalam menjalankan tugasnya. Beberapa aspek strategis tersebut antara lain:

1. Melakukan pembinaan, pengawasan dan ketertiban bidang Transportasi.
2. Meningkatkan kinerja Layanan Sarana dan Prasarana Transportasi.

3. Memastikan keterjangkauan masyarakat terhadap Pelayanan Transportasi yang handal.
4. Mengembangkan sistem Jaringan Transportasi yang terintegrasi dalam mewujudkan Konektivitas Antar Wilayah.
5. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM Perhubungan dalam rangka meningkatkan profesionalisme kerja.

1.5.2. Permasalahan Utama

Permasalahan yang dihadapi di dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pembinaan, pengawasan dan ketertiban bidang Transportasi.
2. Lebih ditingkatkannya kinerja Layanan Sarana dan Prasarana Transportasi.
3. Memastikan keterjangkauan masyarakat terhadap Pelayanan Transportasi yang handal.
4. Pengembangan sistem Jaringan Transportasi yang terintegrasi dalam mewujudkan Konektivitas Antar Wilayah.
5. Kurangnya kapasitas dan kualitas SDM Perhubungan dalam rangka meningkatkan profesionalisme kerja.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 yang meliputi RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026, Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021- 2026, dan Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan antara Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Bupati Pesisir Selatan yang harus dipenuhi sepanjang tahun 2025. Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan susunan agenda, prioritas, sasaran pembangunan pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan serta Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021 – 2026.

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan khususnya Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan yang dituangkan dalam RPJMD selama kurun waktu 2021-2026 secara berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul, yang mengandung rumusan tugas, fungsi, sasaran strategis, yang meliputi kebijakan dan program yang realistis, dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Perencanaan strategis ini akan didukung oleh perencanaan kinerja dan penetapan kinerja setiap tahunnya.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kabupaten Pesisir Selatan yaitu : ***“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat, Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel dan Profesional”***

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat

mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Adapun Misi dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif Demokratis dan Transparan;
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat;
3. Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah;
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan;
5. Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing; dan
6. Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenteram dan Dinamis.

Berdasarkan keenam misi tersebut, dapat dilihat bahwa Misi Kesatu dan Misi Ketiga berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, yakni :

1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif Demokratis dan Transparan;
2. Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan Daerah.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Misi, Tujuan dan Sasaran
Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
(2)	(3)	(4)	(5)
Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Rasio Konektifitas
		Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah

2.1.2 Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif sebagai berikut :

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

<i>VISI : “Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat, Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel dan Profesional”</i>			
<i>MISI I : “Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan”</i>			
<i>MISI III : Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan berkinerja	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja
	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Meningkatnya Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	
Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Memaksimalkan Sosialisasi dan Penertiban Lalu Lintas 2. Memaksimalkan Sarana dan Prasarana Transportasi
		Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur	
		Rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi	
		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	
		Pengadaan dan pemasangan serta pemeliharaan alat keselamatan lalu lintas dalam rangka menurunkan angka kecelakaan lalu lintas	
		Sosialisasi dan pembinaan lalu lintas dan angkutan	
		Penertiban terhadap alat transportasi yang tidak memenuhi standar keselamatan	

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

2.1.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pengukuran keberhasilan suatu target kinerja perangkat daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2021-2026 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

No	Sasaran Strategis	Indikator	Formulasi	Satuan	Target						Sumber Data	Penanggung Jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai LKJIP	Hasil Evaluasi Inspektorat terhadap AKIP Dinas Perhubungan	Tanpa Satuan	BB(74)	BB(76)	A(81))	A(82)	A(84)	A(86)	Bagian Sekretariat, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Prasarana, Bidang Pengembangan dan Kesematanan	Dinas Perhubungan
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah		Angka	100	100	100	100	89	91	Bagian Sekretariat, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Prasarana, Bidang Pengembangan dan Kesematanan	Dinas Perhubungan
3	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Rasio Konektivitas	(IK1 x Bobot Angkutan Jalan)+ (IK2x Bobot Angkutan Sungai danau dan Penyebrangan	Angka	0,52	0,52	0,53	0,53	0,57	0,59	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Prasarana, Bidang Pengembangan dan Kesematanan	Dinas Perhubungan

*Sumber data : Renstra 2021 – 2026 Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan bagian penting dari sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, yang menjadi komitmen bagi Kepala Daerah untuk mencapainya.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2025, IKU dan APBD. Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja SKPD Dinas Perhubungan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja
Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A(89,95)
2	Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	89
3	Meningkatnya kualitas Infrastruktur	Rasio Konektifitas	0.57

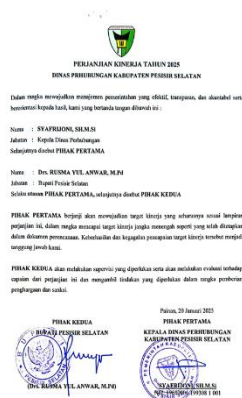
No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 5.430.328.837
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 9.848.477.921
3	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp 79.560.400
	Jumlah	Rp 15.353.367.158

Setelah Anggaran 2025 dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan melakukan Revisi atas Perjanjian Kinerja yang meliputi perubahan anggaran menyesuaikan dengan kondisi anggaran setelah anggaran perubahan, dimana terjadi perubahan pagu dana Program dan Kegiatan yang bertujuan untuk efektifitas dalam kebutuhan pelaksanaan realisasi keuangan.

Tabel 2.4
Revisi Perjanjian Kinerja
Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A(89,95)
2	Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	89
3	Meningkatnya kualitas Infrastruktur	Rasio Konektifitas	0.57

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 5.271.342.685
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 12.870.702.309
3	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp 65.015.400
Jumlah		Rp 18.207.060.394



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A(89,95)
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	89
3	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Rasio Konektifitas	0,57

No.	Program	Anggaran	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.271.342.685,-	-
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 12.870.702.309,-	-
3	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp 65.015.400,-	-
Jumlah		Rp 18.207.060.394,-	-

Padang, 20 Januari 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI PESISIR SELATAN

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban dari instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui selisih atau celah kinerja (performance gap), berdasarkan hasil pengukuran kinerja dilakukan analisis dan evaluasi baik terhadap kinerja maupun terhadap penggunaan sumber daya untuk menetapkan strategi yang tepat dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement). Laporan Kinerja Tahunan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

Pengukuran Kinerja adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025. Metode pengukuran kinerja digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan.

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah. Adapun Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara:

- a. Membandingkan realisasi Kinerja dengan sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan pada Dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD.
- b. Membandingkan realisasi Kinerja Sasaran sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) Kinerja 5 tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis OPD. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

❖ Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

❖ Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Tabel 3.1

Skala pengukuran capaian sasaran kinerja perangkat daerah

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Gagal

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Analisis atas capaian kinerja pada tahun 2025 merupakan analisis terhadap komitmen Dinas Perhubungan guna mencapai target kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan

Kabupaten Pesisir Selatan Dari 3 Sasaran Strategis ditetapkan 3 Indikator Kinerja sasaran sebagai ukuran keberhasilan kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2025, Indikator Kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Nilai AKIP Perangkat Daerah
2. Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah
3. Rasio Konektifitas

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A(85,95)	*A(85,93)	96
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Daerah	87	87	100
3.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Rasio Konektifitas	0.57	0.52	91,22
Rata – rata Capaian					95,74

Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan sudah bagus. Dari 3 (tiga) indikator tersebut rata-rata capaian indikator kinerja sasaran dinyatakan sangat baik dari target yang telah ditetapkan.

Dari Tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2025 ini ada 3 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 yaitu :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan dengan target A (85,95). Capaian indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan adalah A (85,95) atau sebesar 96% dengan predikat **sangat baik**, Nilai AKIP memakai nilai evaluasi Tahun 2024 dikarenakan Nilai AKIP Dinas Perhubungan Tahun 2025 yang nilai ini baru bisa diperoleh sekitar pada bulan Maret Tahun 2026
2. Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perhubungan dengan target 89 Capaian indikator Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian adalah 89 atau sebesar 100% dengan predikat **sangat baik**.

3. Rasio Konektifitas dengan target tahun 2025 adalah 0.57 untuk tahun 2025 capaian indikator Rasio Konektifitas adalah 0.52 atau sebesar 91,22% dengan predikat **sangat baik**.

Capaian rata-rata ke 3 (tiga) indikator kinerja tersebut diatas adalah sebesar 95,74% dengan predikat **sangat baik**.

3.3. Capain Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2025, berdasarkan hasil pengukuran di atas dapat disajikan melalui analisis capaian kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut :

<i>Sasaran Strategis 1</i>
<i>Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja</i>

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan.

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Staretgis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Dinas Perhubungan	Tanpa Satuan	A (85,95)	A (85,93)	96
Rata-rata capaian kinerja						96

Sumber : Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan

Data : Hasil AKIP 2024

Dari Tabel 3.3 diatas dapat dilihat bahwa Nilai AKIP Dinas Perhubungan masih menggunakan nilai AKIP Tahun 2024 dikarenakan nilai Akuntabilitas Kineja Instasi Pemerintah belum tersedia. Nilai AKIP Dinas Perhubungan tahun 2025 diperoleh setelah Hasil Evaluasi terhadap Laporan Kinerja (LKJ) tahun 2025.

Dari hasil Penilaian terhadap indikator Kinerja Sasaran I tahun 2024 yang meliputi Perencanaan kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja yang dapat diterprestasikan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai Akuntabilitas Kinerja Sangat Baik.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.4 dibawah ini :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun lalu dan
Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Terwujudnya pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Dinas Perhubungan	A	A (85)	A(89,95)	A(84,4)	A(84,54)	A(85,93)

Sumber : Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan

Data : Hasil AKIP 2024

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir tahun lalu dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Dinas Perhubungan dapat dilihat pada Tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target dalam Dokumen Perencanan Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	Terwujudnya pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Dinas Perhubungan	A (85,93)	A (86)	96	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Sumber : Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar provinsi dan nasional

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai AKIP Dinas Perhubungan tahun lalu dengan Standar Provinsi dan Nasional dapat dilihat pada tabel 3.6 dibawah ini :

Tabel 3.6
Perbandingan Nilai AKIP Dinas Perhubungan dengan Standar Provinsi dan Nasional Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Dinas Perhubungan Pesisir Selatan	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat	Kemementerianian Perhubungan
1	Terwujudnya pemerintahan Yang Akuntabel Dan Berkinerja	Nilai AKIP Dinas Perhubungan	Tanpa Satuan	A (85,93)*		

Sumber : Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan

Data : Hasil AKIP 2024

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta Solusi yang dilakukan pada Indikator kinerja Nilai AKIP Dinas Perhubungan sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

Dinas Perhubungan telah membuat dan Menyusun Dokumen Perencanaan kinerja terdiri dari :

- Perencanaan Kinerja Jangka menengah, yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mana ini dibuat untuk lima tahun kedepan.
- Perencanaan Kinerja Tahunan yaitu berupa dokumen Rencana Kerja(Renja) Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK)
- Perencanaan aktivitas pendukung kinerja, yaitu Rencana Aksi untuk Kinerja dan Program Kegiatan
- Perencanaan Anggaran yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Dari semua Dokumen perencanaan kinerja yang telah disusun dan publikasikan pada website Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

<http://dishub.pesisirselatankab.go.id>

2. Pengukuran Kinerja

Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan sudah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis operasional. Pimpinan pada setiap level jabatan telah terlibat sebagai pengambil keputusan untuk mengukur dan melakukan pemantauan terhadap capaian kinerja bawahannya.

3. Pelaporan Kinerja

Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan setiap tahunnya Menyusun laporan kinerja (LKj) yang dalam penyusunan laporan tersebut terlebih dahulu dilakukan asistensi penyusunan LKj dengan bagian organisasi Sekretariat Daerah tentang sistematika Penyusunan Laporan Kinerja seetelah selesai kemudian disampaikan ke Bagian organisasi sebagai bahan dalam penyusunan LKj yang akan dilakukan reviu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

4. Evaluasi Akuntabilitas Kierja Internal

Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan sudah melakukan Pemantauan capaian Kinerja secara berkala (pertriwulan) dengan melalui rapat-rapat untuk melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja kegiatan rapat-rapat monitoring dan evaluasi dapat dilihat pada gambar

f. Analisis atau efisiensi Penggunaan Sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumberdaya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.7
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	A (89,95)	A (85,93) *	96	5.271.342.685,00	5.163.709.101,00	97,96	2,04

Sumber : Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan

Data : Hasil AKIP 2024

Perhitungan Tingkat Efisiensi Sumber daya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI No.214/PMK.02/2017, sebagai berikut:

$$\text{Tingkat efisiensi} = \frac{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran}}{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja})} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tingkat efisiensi} &= \frac{(5.271.342.685 \times 96) - 5.163.709.101}{((5.271.342.685 \times 96))} \times 100\% \\ &= 2,04 \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 2,04% Target Nilai AKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah A (89,95), dan untuk realisasinya menggunakan data hasil evaluasi AKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 sebesar A (85,93) serta untuk capaian kinerja sebesar 97,96%.

II. HASIL EVALUASI

A. Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 pada Dinas Perhubungan memperoleh nilai **85,93** dengan predikat **"A"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Memuaskan"**, dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	25,76
2	Pengukuran Kinerja	30,00	26,72
3	Pelaporan Kinerja	15,00	14,20
4	Evaluasi Internal	25,00	19,25
Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja		100,00	
Nilai Hasil Evaluasi SAKIP.			85,93
Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)			A

Dari hasil evaluasi atas Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 oleh Inspektorat , ada beberapa rekomendasi untuk perbaikan kinerja selanjutnya yaitu :

B. REKOMENDASI ATAS CATATAN KEKURANGAN UNTUK PERBAIKAN

Terhadap hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perhubungan, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

- Isu strategis menjadi acuan dalam perumusan tujuan agar tujuan organisasi dapat dicapai.
- Melakukan perbaikan terhadap target sasaran meningkatnya kualitas inovasi daerah, agar target dapat dicapai sehingga memenuhi kriteria SMART.
- Anggaran yang ditetapkan dan aktivitas yang dilaksanakan sepenuhnya mendukung kinerja yang ingin dicapai.
- Melakukan pemantauan kinerja dalam periode bulanan. Apabila terdapat deviasi agar dilakukan analisa dan pemberian solusi atas permasalahan yang ditemukan.
- Notulen rapat monitoring rencana aksi memaparkan analisa terkait faktor hambatan/permasalahan dalam pencapaian target serta tindak lanjut yang telah atau harus dilaksanakan.

2. Pengukuran Kinerja

- Agar data kinerja yang dikumpulkan relevan untuk mengukur dan membantu mencapai kinerja yang diharapkan.

c. Memanfaatkan pengukuran kinerja dalam hal penyesuaian aktivitas dan anggaran dalam rangka mencapai kinerja.

d. Melakukan upaya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja untuk semua sasaran.

3. Pelaporan Kinerja

- Melakukan peningkatan kepedulian pegawai terhadap informasi Laporan Kinerja.
- Memanfaatkan informasi Laporan Kinerja dalam hal perbaikan capaian kinerja organisasi yang lebih baik pada periode berikutnya.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

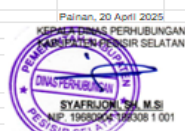
- Dalam melakukan pemantauan capaian kinerja internal minimal membahas mengenai target kinerja, realisasi kinerja, faktor pendorong, faktor penghambat dan rekomendasi.
- Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi e-sakip dalam melakukan pemantauan capaian kinerja.
- Memanfaatkan hasil Evaluasi AKIP untuk perbaikan, peningkatan, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas kinerja.

Dari rekomendasi atas evaluasi laporan kinerja tersebut sudah ditindaklanjuti dengan membuat matriks tindak lanjut yang disampaikan ke Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan seperti terlampir pada gambar dibawah ini :

MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESIR SELATAN
TAHUN 2024

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status/Progres Penyelesaian	Koordinator	Eviden
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Perencanaan Kinerja								
a.	Isu strategis menjadi acuan dalam perumusan tujuan agar tujuan organisasi dapat dicapai.	Dalam merumuskan Isu Strategis pada Dinas Perhubungan terlebih dahulu melihat apa yang menjadi tujuan dan Dinas Perhubungan	1 Dokumen	1 Tahun	Kepala Dinas Perhubungan	Selesai	Sekretaris Dinas Perhubungan	SAKIP R 1a Propoasal 2025
b.	Melakukan perbaikan terhadap target sasaran meningkatnya kualitas inovasi, agar target dapat dicapai sehingga memenuhi kriteria SMART.	Telah dilakukan perbaikan Target Meningkatnya Kualitas Inovasi terdapat Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025	1 Berkas	1 Tahun	Kepala Dinas Perhubungan	Selesai	Sekretaris Dinas Perhubungan	PK Eselon Kepala Dinas
c.	Anggaran yang ditetapkan dan aktivitas yang dilaksanakan sepenuhnya mendukung kinerja yang ingin dicapai.	Anggaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung kinerja dapat dilihat pada laporan bulanan di Aplikasi Simbanga	1 Dokumen	1 Tahun	Kepala Dinas Perhubungan	proses	Sekretaris Dinas Perhubungan	Laporan Realisasi Fiskal dan Keuangan
d.	Melakukan Pemantauan kinerja dalam periode bulanan. Apabila terdapat deviasi agar dilakukan analisa dan pemberian solusi atas permasalahan yang ditemukan.	Dilakukan Rapat setiap Triwulan untuk membahas mengenai target kinerja, realisasi kinerja serta membahas faktor Pendorong dan Penghambat	1 laporan	1 Tahun	Kepala Dinas Perhubungan	proses	Sekretaris Dinas Perhubungan	SAKIP R 1e Notulen Rapat, Daftar Hadir, Dokumentasi
e.	Notulen rapat monitoring rencana aksi memaparkan analisa terkait faktor hambatan/permasalahan dalam pencapaian target serta tindak lanjut yang telah atau harus dilaksanakan.	Monitoring rencana aksi telah memaparkan analisa terkait faktor hambatan/permasalahan dalam pencapaian target	1 Laporan	1 Tahun	Kepala Dinas Perhubungan	Selesai	Sekretaris Dinas Perhubungan	SAKIP R 1e Notulen Rapat, Daftar Hadir, Dokumentasi

2 Pengukuran Kinerja								
a.	Agar data kinerja yang dikumpulkan relevan untuk mengukur dan membantu mencapai kinerja yang diharapkan	Melakukan Rapat perwujudan untuk menyesuaikan data kinerja yang dikumpulkan dalam mengukur capaian kinerja	1 Dokumen	1 Tahun	Kepala Dinas Perhubungan	Proses	Sekretaris Dinas Perhubungan	SAKIP R2a
b.	Memantapkan Pengukuran kinerja dalam hal ini penyusunan aktivitas dan anggaran dalam rangka mencapai kinerja.	Melakukan Rapat perwujudan untuk mengukur capaian kinerja dan membandingkannya dengan realisasi Anggaran	berkas	Maret-Desember 2025	Kepala Dinas Perhubungan	proses	Sekretaris Dinas Perhubungan	SAKIP R2b
c.	Melakukan upaya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja untuk semua sasaran	Melaksanakan efisiensi anggaran sesuai dengan edaran Bapak Bupati	berkas	Maret-Desember 2025	Kepala Dinas Perhubungan	proses	Sekretaris Dinas Perhubungan	SAKIP R2c
3 Pelaporan Kinerja								
a.	Melakukan peningkatan kepedulian pegawai terhadap informasi Laporan Kinerja	Telah dibuat Dokumen Laporan Kinerja secara berkualitas sesuai Standar yang ditetapkan	1 Dokumen	Maret-Mei 2025	Kepala Dinas Perhubungan	Selesai	Sekretaris Dinas Perhubungan	SAKIP R3a Dokumen LKJ
b.	Memantapkan Informasi Laporan Kinerja dalam hal perbaikan capaian kinerja organisasi yang lebih baik pada periode berikutnya.	Didalam Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja di level nasional	1 Dokumen	Maret-Mei 2025	Kepala Dinas Perhubungan	Selesai	Sekretaris Dinas Perhubungan	SAKIP R3b Dokumen LKJ
4 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal								
a.	Dalam melakukan pemantauan capaian kinerja internal minimal membahas mengenai target kinerja, realisasi kinerja, Faktor pendorong, faktor penghambat dan rekomendasi	Dilakukan Rapat setiap Triwulan untuk membahas mengenai target kinerja, realisasi kinerja serta membahas faktor Pendorong dan Penghambat	berkas	Maret-Desember 2025	Kepala Dinas Perhubungan	selesai	Sekretaris Dinas Perhubungan	SAKIP R4a Matrik Tindak Lanjut LHE
b.	Memoptimalikan penggunaan teknologi informasi E-Sakip dalam melakukan pemantauan capaian kinerja	Melakukan asprod laporan capaian kinerja di aplikasi e Sakip	berkas	Maret-Desember 2025	Kepala Dinas Perhubungan	Sedang dilaksanakan	Sekretaris Dinas Perhubungan	SAKIP R4a Matrik Tindak Lanjut LHE
c.	Memantapkan hasil Evaluasi AKIP untuk perbaikan, peningkatan, Akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas kinerja.	Telah dilakukan rapat dalam mendokumentasi evaluasi AKIP untuk peningkatan Akuntabilitas efisiensi dan efektifitas kinerja	berkas	Maret-Desember 2025	Kepala Dinas Perhubungan	Sedang dilaksanakan	Sekretaris Dinas Perhubungan	SAKIP R4c notulen Rapat, Daftar Hadir, Dokumentasi



g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan terdiri dari :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Adminitasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - f. Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjangn Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Realisasi Program/Kegiatan untuk mendukung capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah sebesar Rp 5.163.709.101,- atau 97,96% dari total anggaran sebesar Rp 5.271.342.685,-, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 2,04%.

Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis **Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah** terdiri 1 Indikator kinerja

yaitu Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

a. Membandingkan antara Target dan Realisasi kinerja tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.8 dibawah ini :

Tabel 3.8
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah
Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perhubungan	Tanpa Satuan	87	87	100
Rata-rata capaian						100

Sumber : Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan

Dari Tabel 3.4 diatas dapat dilihat realisasi capaian Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perhubungan mencapai 87,00 dari target 87,00 atau tingkat capaiannya mencapai 100%.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan terus berkomitmen dalam meningkatkan inovasi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan guna menciptakan sistem transportasi yang lebih aman, tertib, dan efisien. Upaya ini membuahkan hasil dengan perolehan nilai capaian inovasi yang membanggakan dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) pada tahun 2025.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai program dan inovasi yang telah diterapkan, di antaranya:

- Digitalisasi Layanan Pengaduan** – Forum LLAJ membuat Aplikasi berbasis Android sehingga segala pengaduan masyarakat berkaitan Lalu Lintas yang macet dapat di Adukan oleh Masyarakat sesegera mungkin. Sistem Aduan Masyarakat – Lalu Lintas (SiAM-LALIN) sudah terdaftar diPlaystore, dengan Aplikasi android yang mempermudah masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan mengadukan musibah/kejadian secara online dengan memberikan foto kejadian dimana pelapor sudah registrasi terlebih dahulu ke Aplikasi FLLAJ Pessel. Fitur-fitur Pengaduan Masyarakat sangat mudah, dengan cara masyarakat personal sebagai user / pengguna

aplikasi diharuskan mendaftar dulu sebagai pengadu laporan, setelah mendapatkan user dan password, Masyarakat dapat melaporkan secara langsung di lokasi kejadian yang mengakibatkan lalu lintas jalan raya terganggu. Layanan pengaduan akan tampil di website <https://flaj.pesisirselatankab.go.id/> dan akan segera diproses/ditindaklanjuti oleh dinas terkait sesuai laporan yang di berikan.

2. **Digitalisasi Peminjaman Rambu-rambu Lalu Lintas** – Menyediakan pinjaman rambu-rambu lalu lintas guna penerapan rekayasa lalu lintas yang berfungsi alat pembagi lajur atau jalur berfungsi untuk mengatur lalu lintas dengan jangka waktu sementara dan membantu untuk melindungi pengendara, pejalan kaki, dan dan pekerja dari daerah yang berpotensi tinggi akan menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Jenis rambu-rambu yang dipinjamkan antara lain : *Water Barrier, Traffic Cone, Rambu Pengarah, Rambu Stop* dan *Rambu Verboden*. Layanan peminjaman rambu-rambu LALIN dapat diakses pada website <https://flaj.pesisirselatankab.go.id/Peminjaman>
3. **Peningkatan Infrastruktur dan Keselamatan Jalan** – Implementasi perbaikan infrastruktur, pengembangan fasilitas bagi pejalan kaki, serta pemasangan rambu dan marka jalan yang lebih efektif.
4. **Sinergi dan Partisipasi Masyarakat** – Peningkatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kepolisian, dinas perhubungan, akademisi, dan komunitas pengguna jalan.
5. Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa inovasi di sektor lalu lintas dan angkutan jalan dapat memberikan dampak positif dalam menciptakan mobilitas yang lebih lancar dan berkelanjutan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen yang terlibat dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta menegaskan bahwa inovasi akan terus menjadi fokus utama dalam meningkatkan kualitas layanan transportasi di Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.9 dibawah ini :

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatny a Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perhubungan	100	100	87	84	87	87

Sumber : Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan

Dari Tabel 3.9 diatas dapat dilihat bahwa Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perhubungan Tahun 2025 sama dengan capaian tahun 2024.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perhubungan tahun lalu dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Perhubungan dapat dilihat pada tabel 3.10 dibawah ini :

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perhubungan	94,00	100,00	94,00	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Sumber : Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar Provinsi dan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas

Perhubungan Tahun 2025 dengan provinsi dan nasional tidak dapat dibandingkan karena merupakan target yang hanya ditetapkan pada Dinas Perhubungan yang merupakan jabaran dari target Inovasi Daerah yang sifat spesifik yang ditetapkan pada tahun 2025.

e. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada Indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi dapat dilihat pada tabel 3.11 dibawah ini :

Tabel 3.11
Analisa Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perhubungan	Tanpa Satuan	87	87	100	Untuk inovasi Smart tidak tercapai karena ada beberapa fitur yang belum lengkap	Meningkatnya nilai kematangan inovasi dengan cara menambahkan beberapa fitur dan perlu membuat video singkat agar Inovasi bisa termasuk Smart

Sumber : Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan

f. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.12
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perhubungsn	87	87	100	5.271.342.685,00	5.163.709.101,00	97.96	2.04

Sumber : Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan

g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

l. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan terdiri dari :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - c. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Adminitasi Umum Perangkat Daerah
 - d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - e. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - f. Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan
 - g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - h. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - i. Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - j. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - k. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjangn Urusan Pemerintahan Daerah
 - l. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan
 - m. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - n. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - o. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Realisasi Program/Kegiatan untuk mendukung capaian Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah sebesar Rp 5.163.709.101,- atau 97,96% dari total anggaran sebesar Rp 5.271.342.685,-, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 2,04%.

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah dengan mempunyai Indikator Rasio Kenektifitas.

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.13 dibawah ini :

Tabel 3.13

**Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Strategis Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah
Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Rasio Konektivitas	angka	0,57	0,52	91,22
Rata-rata capaian kinerja						91,22

Dari tabel 3.13 diatas dapat dilihat bahwa sasaran strategis meningkatnya kualitas Infrastruktur dengan Indikator Rasio Konektivitas sebesar 91,22%, ini merupakan persentase wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang sudah terlayani oleh moda transportasi darat. Berikut merupakan formulasinya:

Berdasarkan Permendagri 18 Tahun 2020

Rasio konektivitas Kabupaten :

= (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)

1. IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd provinsi x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut).
2. IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pd provinsi tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi tersebut)

Note:

- Bobot angkutan jalan = 70 dan Bobot untuk ASDP = 30 (sesuai dengan Permendagri 18 Tahun 2020)
- Untuk bobot trayek atau lintas berdasarkan jumlah perjalanan angkutan (frekuensi), yaitu:
 - a) Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi tinggi (>5 x dalam seminggu), bobot = 1
 - b) Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi sedang (3-4 x dalam seminggu), bobot = 0,8
 - c) Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi rendah (<3 x dalam seminggu), bobot = 0,5

Rasio Konektivitas Kabupaten Pesisir Selatan Dinas Perhubungan Tahun 2025

IK 1 (Angkutan Jalan) = (Jumlah trayek yang di layani pada Kabupaten/Kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut)

Jumlah Trayek yang dilayani pada Kabupaten sebanyak **36 (Tiga Puluh Enam)** Trayek

IK1 (Angkutan Jalan)

- Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP
- Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu

Sementara Jumlah Kebutuhan Trayek pada Kabupaten sebanyak = **55 (Lima Puluh Lima)** Trayek

Bobot Trayek atau Lintas :

- a. Bobot Trayek atau Lintas dengan **frekuensi tinggi** (>5x dalam seminggu), Bobot = 1
- b. Bobot Trayek atau Lintas dengan **frekuensi sedang** (3-4 dalam seminggu), Bobot = 0.8
- c. Bobot Trayek atau Lintas dengan **frekuensi rendah** (< 3 dalam seminggu), Bobot = 0.5

Jumlah AKAP dan Kendaraan yang melintas rata rata dalam seminggu 3-4 kali melewati Kabupaten Pesisir Selatan, maka **Angka Bobot** yang digunakan adalah **1**

Menyesuaikan dengan Rumus Indeks yang ada ;

$$\frac{36 \times 0,8}{55} = \frac{28,8}{55} = 0,52$$

RASIO KONEKTIVITAS ANGKUTAN SUNGAI DANAU PENYEBERANGAN

IK 2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan) = (Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada Kabupaten/Kota tersebut x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut)

IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)

- Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintas perintis ditambah lintas komersil.

Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi : 0

- Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan balik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu.

Jumlah Kebutuhan Lintas = 0

Bobot Trayek atau Lintas :

- d. Bobot Trayek atau Lintas dengan **frekuensi tinggi** (>5x dalam seminggu), Bobot = 1
- e. Bobot Trayek atau Lintas dengan **frekuensi sedang** (3-4 dalam seminggu), Bobot = 0.8
- f. Bobot Trayek atau Lintas dengan **frekuensi rendah** (< 3 dalam seminggu), Bobot = 0.5

Jumlah lintas penyeberangan yang melintas rata rata dalam seminggu < 3 kali melewati Kabupaten Pesisir Selatan, maka **Angka Bobot** yang digunakan adalah **0,5** Menyesuaikan dengan Rumus Indeks yang ada ;

$$\frac{0 \times 0}{0} = \frac{0}{0} = 0$$

RASIO KONEKTIVITAS KABUPATEN / KOTA

Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (**bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100**)

$$\begin{aligned} \text{Rasio Konektivitas Kabupaten / Kota} &= (IK\ 1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{bobot} \\ &\text{angkutan sungai danau dan penyeberangan}) \\ &= (0,52 \times 100) + (0 \times 0) \\ &= \mathbf{52} \text{ (Rasio } 0,52) \end{aligned}$$

Dalam pencapaian indikator dari sasaran strategis telah menampilkan hasil yang sangat baik, dengan capaian kinerja mencapai 91,22%. Pada tahun 2025 Jumlah kebutuhan trayek pada Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 55 (lima puluh lima) trayek sementara trayek yang terlayani sebanyak 36 (tiga puluh enam), dan untuk menentukan Rasio konektivitas kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2025 adalah jumlah trayek yang dilayani pada Kabupaten/Kota x Bobot Trayek) dan dibagi kebutuhan trayek pada Kabupaten/Kota. hal ini dapat disimpulkan bahwa di Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan untuk keterlayanan trayek yang menghubungkan wilayah atau rasio konektivitas sudah tercapai 0.52

Data jumlah Trayek yang terlayani di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2025 seperti dapat dilihat pada tabel 3.14 dibawah ini :

Tabel 3.14
Jumlah Rute Trayek yang Terlayani di Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025

No.	KODE TRAYEK	RUTE TRAYEK	Angkutan Yang Melayani
I	TR.1	KECAMATAN KOTO XI TARUSAN	
1	TR.1.01	Pasar Tarusan - Terminal Pasar Baru	Angkutan Plat Hitam
2	TR.1.02	Pasar Tarusan - Ampang Pulai - Mandeh - Sungai Nyalo - Sungai Pinang	Tidak Terlayani
3	TR.1.03	Pasar Tarusan - Batu Hampar - Duku - Barung barung Belantai - Siguntur	Angkutan Plat Hitam dan Bentor
4	TR.1.04	Pasar Tarusan - Gurun Panjang - Kapuh	Tidak Terlayani
II	TR.2	KECAMATAN BAYANG	
5	TR.2.01	Terminal Pasar Baru - Luhung - Sago	Tidak Terlayani
6	TR.2.02	Terminal Pasar Baru - Talaok - Koto Berapak - Asam Kumbang - Muara Air - Pancung Taba	Angkutan Plat Hitam
7	TR.2.03	Terminal Pasar Baru - Tanah Keras - Gurun Panjang - Teluk Bakung	Tidak Terlayani
III	TR.3	KECAMATAN IV JURAI	
8	TR.3.01	Painan - Salido - Sago - Terminal Pasar Baru	Angkutan Plat Hitam
9	TR.3.02	Salido Kecil - Bungo Pasang - Sago - Terminal Pasar Baru	Tidak Terlayani
10	TR.3.03	Limau Gadang Lumpo - Batu Kunit Lumpo - Laban - Sago - Terminal Pasar Baru	Tidak Terlayani
11	TR.3.04	Terminal Pasar Baru - Sago - Sungai Nipah - Taluk Batung - Pasar Batang Kapas	Tidak Terlayani
12	TR.3.05	Pasar Lumpo - Gunung Bungkuk Lumpo - Sungai Gayo Lumpo - Sungai Sarik Lumpo - Sago - Terminal Pasar Baru	Tidak Terlayani
IV	TR.4	KECAMATAN BATANG KAPAS	
13	TR.4.01	Pasar Batang Kapas - Lubuk Nyiur - Teratak Tampatih	Angkutan Plat Hitam
14	TR.4.02	Pasar Batang Kapas - Sungai Nyalo - Tuik	Tidak Terlayani
15	TR.4.03	Pasar Batang Kapas - Anakan - Teluk Kasai - Sungai Bungin	Tidak Terlayani
16	TR.4.04	Pasar Batang Kapas - Sungai Pampan - Taluk - Taratak - Surantih	Angkutan Plat Hitam
17	TR.4.05	Pasar Batang Kapas - Terminal Pasar Baru	Damri
V	TR.5	KECAMATAN SUTERA	
18	TR.5.01	Pasar Surantih - Timbulun - Koto Berapak - Ampalu - Langgai	Angkutan Plat Hitam
19	TR.5.02	Pasar Surantih - Amping Parak - Tanjung Gadang	Kendaraan Modifikasi
20	TR.5.03	Pasar Surantih - Amping Parak - Pasir Putih - Pasar Kambang	Kendaraan Modifikasi

21	TR.5.04	Pasar Surantih - Terminal Pasar Baru	Damri
VI	TR.6	KECAMATAN LENGAYANG	
22	TR.6.01	Pasar Kambang - Koto Baru - Limau Kulam - Kampung Akat	Kendaraan Modifikasi
23	TR.6.02	Pasar Kambang - Kapau - Koto Kandis - Koto Pulai	Kendaraan Modifikasi
24	TR.6.03	Pasar Kambang - Padang Harapan - Lubuk Sarik	Tidak Terlayani
25	TR.6.04	Pasar Kambang - Ganting - Tampunik	Kendaraan Modifikasi
26	TR.6.05	Pasar Kambang - Lakitan - Air Kalam	Bus Perhubungan
27	TR.6.06	Pasar Kambang - Lakitan - Padang Laban - Labuhan - Pasar Balai Selasa	Tidak Terlayani
28	TR.6.07	Pasar Kambang - Terminal Pasar Baru	Damri
VII	TR.7	KECAMATAN RANAH PESISIR	
29	TR.7.01	Pasar Balai Selasa - Labuhan Sungai Liku	Angkutan Plat Hitam
30	TR.7.02	Pasar Balai Selasa - Lubuk Cubadak - Pelangai Kaciak	Angkutan Plat Hitam (Khusus Pelajar)
31	TR.7.03	Pasar Balai Selasa - Simpang Tiga Paleh - Sumedang	Angkutan Plat Hitam (Khusus Pelajar)
32	TR.7.04	Pasar Balai Selasa - Sungai Tunu - Punggasan - Pasar Air Haji	Tidak Terlayani
33	TR.7.05	Pasar Balai Selasa - Terminal Pasar Baru	Damri
VIII	TR.8	KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI	
34	TR.8.01	Pasar Air Haji - Pungasan - Sungai Tunu	Plat Hitam, Ojek, Kendaraan Modifikasi
35	TR.8.02	Pasar Air Haji - Lubuk Buaya - Pasar Punggasan	Plat Hitam, Ojek, Kendaraan Modifikasi
36	TR.8.03	Pasar Air Haji - Air Haji Tengah - Rantau Simalenang	Plat Hitam, Ojek, Kendaraan Modifikasi
37	TR.8.04	Pasar Air Haji - Labuhan Tanjak - Muara Gadang	Plat Hitam, Ojek, Kendaraan Modifikasi
38	TR.8.05	Pasar Air Haji - Pungasan - Muara Kandis	Tidak Terlayani
39	TR.8.06	Pasar Air Haji - Pasar Bukit - Sungai Sirah - Pasar Ilalang Panjang	Plat Hitam, Ojek, Kendaraan Modifikasi
40	TR.8.07	Pasar Air Haji - Terminal Pasar Baru	Damri, Travel
IX	TR.9	KECAMATAN PANCUNG SOAL	
41	TR.9.01	Pasar Indrapura - Muaro Sakai - Pasar Trans Muara Sakai	OjekK
42	TR.9.02	Pasar Indrapura - Simpang Tiga Pasar Minggu - Loukpon - Damar Rumput - Pasar Lalang Panjang	Kendaraan Modifikasi
43	TR.9.03	Pasar Indrapura - Kantor Camat Air Pura - Damar Rumput - Pasar Ilalang Panjang	Angkutan Plat Hitam
44	TR.9.04	Pasar Indrapura - Sungai Gemuruh - Sungai Kuyung - Tapan	Damri
45	TR.9.05	Pasar Indrapura - Terminal Pasar Baru	Damri

X	TR.10	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN	
46	TR.10.1	Pasar Tapan - Panadah - Cangki Ayam – Sako	Angkutan Plat Hitam
47	TR.10.2	Pasar Tapan - Kumbang – Lunang	Ojek
48	TR.10.3	Pasar Tapan - Terminal Pasar Baru	Ojek
XI	TR.11	KECAMATAN LUNANG	
49	TR.11.01	Simpang Tiga SMP Lunang - Lunang Barat - Lunang II - Lunang III	Ojek
50	TR.11.02	Simpang Tiga SMP Lunang - Lunang I - Tanjung Beringin - Sindang - Pasar Silaut/Terminal Silaut	Ojek
XII	TR.12	KECAMATAN SILAUT	
51	TR.12.01	Pasar Silaut/Terminal Silaut - Tapan - Indrapura - Air Haji - Balai Selasa - Kambang - Surantih - Batang Kapas - Painan - Sago - Terminal Pasar Baru	Tidak Terlayani
52	TR.12.02	Pasar Silaut/Terminal Silaut - Sungai Sarik - Pasir Binjai - Durian Seribu - Pusat KTM – Sambungo	Tidak Terlayani
53	TR.12.03	Pasar Silaut/Terminal Silaut - Sungai Pulai - Air Hitam	Tidak Terlayani
54	TR.12.04	Pasar Silaut/Terminal Silaut - Sungai Serik - Pasir Binjai - Talang Binjai	Tidak Terlayani
55	TR.12.05	Pasar Silaut/Terminal Silaut - Sungai sarik - Pasir Binjai - Sungai Pulai - Lunang III	Tidak Terlayani

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian indikator kinerja Rasio Konektivitas tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.15 dibawah ini :

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu
Dan Beberapa Tahun terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Rasio Konektivitas	0,53	0,53	0,57	0,53	0,53	0,52

Sumber : Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan Strategis Dinas Perhubungan.

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Rasio Konektivitas tahun lalu dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Perhubungan dapat dilihat pada tabel 3.16 dibawah ini :

Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target
Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Rasio Konektivitas	0,52	0,58	89,65	Akan tercapai (atau lebih dari 100%)

Sumber : Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan

d. Membandingkan realisasikinerja tahun 2025 dengan standar Propinsi dan nasional

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Rasio Konektivitas tahun 2025 dengan provinsi dan Nasional, dapat dilihat pada tabel 3.17 dibawah ini :

Tabel 3.16
Perbandingan Rasio Konektivitas Kabupaten Pesisir Selatan
dengan Standar Nasional dan Nasional
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kabupaten Pesisir Selatan	Provinsi Sumatera Barat	Indonesia
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Rasio Konektivitas	Orang	0,52	0,682	0,781

Sumber : Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jika dibandingkan dengan standar nasional/provinsi realisasi 3 tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan distandar nasional atau provinsi realisasi 3 tahun terakhir mengalami perubahan naik turun.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun permasalahan/ kendala yang dihadapi dalam pencapaian target indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kesadaran pengguna jalan dan perilaku masyarakat pengguna jalan yang masih sering mengabaikan keselamatan diri sendiri maupun orang lain seperti mengemudikan kendaraan dalam keadaan mengantuk, sambil menggunakan HP dan ugal-ugalan di jalan.
2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat pengguna jalan akan pentingnya tertib dan disiplin dalam berlalu lintas. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pura-pura tidak tahu.
3. Dukungan ketersediaan anggaran yang tersedia belum mencukupi untuk penyelenggaraan operasional yang lebih baik.
4. Masih minimnya fasilitas keselamatan lalu lintas seperti rambu lalu lintas, marka jalan, APILL, Zoss, pagar pengaman jalan dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas (LPJU) yang terpasang.
5. Kondisi kendaraan yang kurang memenuhi syarat laik jalan karena kurangnya perawatan.
6. Belum disiplinnya para pemilik dan pengguna kendaraan saat memarkirkan kendaraan di badan dan bahu jalan serta sering melanggar larangan.
7. Belum disiplinnya para pedagang dalam menjajakan dagangan mereka hingga ke badan jalan terutama di pasar pasar tingkat Kecamatan.
8. Kondisi jalan yang rusak juga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan.

Strategi/upaya ke depan yang dapat ditempuh dalam meningkatkan capaian indikator ini ditahun berikutnya antara lain :

1. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan serta pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana lalu lintas.
2. Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan tertib lalu lintas kepada masyarakat melalui berbagai media antara lain :
 - Penyuluhan langsung.
 - Pemasangan spanduk keselamatan berlalu lintas, poster, stiker.
 - Menginformasikan melalui website.

3. Melaksanakan pembinaan melalui kegiatan pemeriksaan kendaraan di jalan bekerja sama dengan Polres Pesisir Selatan.
4. Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas (rambu, marka, APILL, Zoss, guardrail) dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas (LPJU).
5. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana.
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran indikator Kinerja Rasio Konektivitas Dinas Perhubungan dapat terlihat pada tabel 3.17 dibawah ini :

Tabel 3.17

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Rasio Konektivitas	0,57	0,52	91,22	12.935.717.709	12.796.271.066	98,92	2.04

Sumber : Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan

Data : Hasil AKIP 2024

Perhitungan Tingkat Efisiensi Sumber daya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI No.214/PMK.02/2017, sebagai berikut:

$$\text{Tingkat efisiensi} = \frac{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran}}{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja})} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tingkat efisiensi} &= \frac{(12.935.717.709 \times 91,22) - 12.796.271.066}{(12.935.717.709 \times 91,22)} \times 100\% \\ &= 0,92 \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 0,92% Target Rasio Konektivitas Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah 0,52. untuk efisiensi Penggunaan sumber

Daya dapat disimpulkan bahwa dalam mencapai target kinerja sasaran 3 Meningkatkan kualitas Infrastruktur Tingkat efisiensinya sebesar 0,92. Hal ini dapat dikatakan efisiensi karena untuk mencapai kinerja sebesar 91,22% hanya membutuhkan Anggaran sebesar 98,92%.

g. Analisis program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam rangka menunjang pencapaian kinerja Rasio Konektivitas yaitu dengan meningkatkan minat masyarakat menggunakan angkutan umum antara lain:

a) Meningkatkan Prasarana Perhubungan, yaitu:

Adanya kegiatan terkait penyediaan dan rehabilitasi perlengkapan jalan di jalan Kabupaten, yaitu:

- Melakukan Pemasangan Alat Penerangan Jalan (PJU) delineator, rambu jalan
- Melakukan Pemasangan cermin tikung, Guardrail, dan Marka Jalan
- Pengadaan Komponen perlengkapan jalan berupa Guardrail dan rambu jalan Serta adanya kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) serta melakukan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal, yaitu:

b) Mengoptimalkan trayek angkutan umum

Permasalahan Angkutan Umum / Angkutan Pedesaan di Kabupaten Pesisir Selatan :

- Jumlah Angkutan Umum Terbatas Permasalahan Jumlah angkutan pedesaan (angkot/ojek) masih terbatas, terutama di daerah nagari dan wilayah terpencil. Akibatnya, masyarakat kesulitan bepergian ke pasar, sekolah, atau fasilitas kesehatan. Pemerintah daerah menambah armada angkutan pedesaan dan memberikan subsidi operasional bagi pengusaha angkutan agar tetap beroperasi di rute sepi penumpang.
- Jadwal Tidak Pasti dan Waktu Tunggu Lama, Angkutan tidak memiliki jadwal tetap, sehingga penumpang harus menunggu lama, terutama di pagi dan sore hari dimana perlu Menetapkan jadwal keberangkatan yang

jas dan teratur. Menerapkan sistem trayek dan jam operasional resmi yang diawasi oleh Dinas Perhubungan.

- Kondisi Kendaraan Kurang Laik Sebagian kendaraan angkutan pedesaan sudah tua dan kurang laik jalan, sehingga mengurangi kenyamanan dan keselamatan penumpang maka perlu dilakukan uji kelayakan kendaraan (KIR) secara rutin dan memberikan bantuan atau kredit ringan untuk peremajaan armada.
- Persaingan dengan Kendaraan Pribadi dan Ojek Online, Masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi atau ojek karena dianggap lebih cepat dan praktis, sehingga penumpang angkutan umum semakin berkurang. Meningkatkan kenyamanan dan ketepatan waktu angkutan umum serta Menyesuaikan tarif agar tetap terjangkau dan kompetitif.

c) Meningkatkan moda transportasi dalam kondisi baik

- Melakukan pemeriksaan laik jalan kendaraan (Rampcheck)

3.1 Realisasi Anggaran

Tabel 3.18
Realisasi anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025 berdasarkan Program

No	Uraian Program / Kegiatan	Anggaran TA 2025	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.271.342.685,-	Rp 5.163.709.101,-	97,96%
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 12.870.702.309,-	Rp 122.732.448.476,-	98,93%
3	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp 65.015.400,-	Rp 63.822.590,-	98,17%
	TOTAL	Rp 16.016.351.962,-	Rp 15.334.923.967,-	98,64%

Sumber data : Sub Bagian perencanaan Keuangan dan Pelaporan

Kegiatan yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam rangka menunjang pencapaian indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

No	Program/ Kegiatan	Belanja Langsung		
		Anggaran	Realisasi	%
A	PROG. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	5.271.342.685	5.163.709.101	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.636.950	21.432.400	99.47
2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.938.204.490	3.859.551.113	92.41
3.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	98.754.000	98.437.449	99.97
4.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6.890.000	884.000	
5.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	6.247.738	4.879.560	98.31
6.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.095.659	22.224.198	97.18
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.040.860	14.050.543	97.79
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000	5.360.000	92.22
9.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.650.000	1.580.000	92.86
10.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.044.000	78.504.020	99.88
11.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	133.305.842	127.618.317	98.96
12.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	735.870.573	729.000.290	99.97
13.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.690.175	39.178.815	99.30
14.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	135.588.398	132.896.396	93.28
15.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.100.000	6.354.000	99.67
16.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.824.000	21.758.000	
B	PROG. PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	12.870.702.309	12.732.448.476	
16.	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	23.658.400	23.464.996	99.61
17.	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	10.267.650	10.165.960	99.90
19.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	3.406.606.503	3.404.137.153	96.51
20.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	9.118.777.716	9.019.813.724	97.65

21.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan dan Pembangunan Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	43.425.000	43.400.000	100.00
22.	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	45.371.040	45.000.000	99.18
23.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	106.887.600	76.143.390	100.00
24.	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota	21.940.000	21.921.200	99.99
25.	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	86.163.900	80.821.353	98.68
26.	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang Antar Kota dalam 1 Kabupaten/Kota	7.604.500	7.580.700	99.79
C	PROG. PENGELOLAAN PELAYARAN	65.015.400	63.822.590	
27.	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	13.460.400	13.286.890	99.67
28.	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal	51.555.000	50.535.700	
	JUMLAH	18.207.060.394	17.959.980.167	98,64

Dari seluruh sub kegiatan yang dilaksanakan realisasinya diatas 98,64%, Sementara kegiatan lainnya dapat mencapai target yang diharapkan, baik dari pencapaian fisik maupun realisasi keuangan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kinerja Dinas Perhubungan dapat dikategorikan sangat baik namun perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk masa yang akan datang dalam penyempurnaan-penyempurnaan kinerja Dinas Perhubungan, untuk itu perlu pengembangan dan peningkatan Sumber Daya Manusia maupun pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang.

Berikut ini dapat dilihat beberapa dokumentasi dari kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dalam upaya pencapaian target kinerja:

- Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor



- Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan



- Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Laut



- Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan terkait dengan pelaksanaan kinerja pada tahun 2025 serta sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada Bab III, Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian Sasaran

Dari 3 (tiga) sasaran yang telah ditetapkan, rata-rata nilai capaian indikator kinerja adalah 96.33% dengan kategori **sangat baik**, dengan nilai tertinggi adalah 98.85% yaitu pada sasaran I Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja.

2. Capaian Indikator Kinerja

Jika dilihat dari realisasi 3 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan yaitu :

- a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan dengan target A (89.85%). Capaian indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan adalah A (85,93%) dengan predikat **sangat baik**, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan ini memakai nilai evaluasi Tahun 2025 dikarenakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Tahun 2024 diperoleh dari nilai evaluasi laporan kinerja Tahun 2024 yang nilai ini baru bisa diperoleh sekitar pada bulan Maret Tahun 2026.
- b. Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perhubungan dengan target 87. Capaian indikator Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perhubungan adalah 87 atau sebesar 100% dengan predikat **sangat baik**.
- c. Nilai Rasio Konektivitas dengan target 0.57 Capaian indikator Nilai Rasio Konektivitas Perhubungan Tahun 2024 adalah 0.52 atau sebesar 91,22% dengan predikat **sangat baik**.
Capaian rata-rata ke 3 (tiga) indikator kinerja tersebut diatas adalah sebesar 96.33% dengan predikat **sangat baik**.

3. Capaian Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis Anggaran belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 yang mendukung pencapaian sasaran strategis dialokasikan sebesar Rp.18.207.060.394,- dan terealisasi sebesar Rp.17.959.980.167 atau sebesar 98,64%.

4.2 Saran

Dari kesimpulan di atas, langkah-langkah yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang adalah:

- a. Secara bertahap melengkapi sarana dan prasarana pada satuan kerja dan mengoptimalkan prasarana yang telah ada dengan melakukan perawatan yang intensif agar prasarana lalu lintas dapat berfungsi dengan baik, melakukan pengawasan dan pengendalian prasarana lalu lintas di setiap jam sibuk, melakukan kajian kebutuhan prasarana lalu lintas untuk perencanaan manajemen rekayasa lalu lintas dan melakukan perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya.
- b. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan teknis sesuai kebutuhan, memberdayakan pegawai dengan kemampuan teknis untuk memberikan pembekalan kepada petugas operasional/lapangan mengenai ketugasan di bidang perhubungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Penyusunan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi kepada pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama.
- d. Meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan setiap kegiatan.
- e. Meningkatkan sosialisasi dan pengawasan terhadap masyarakat akan pentingnya disiplin dalam berlalu lintas.

Painan, 09 Februari 2026

**Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Pesisir Selatan**



(ZONI ELDO, SSTP.,M.A)

Nip. 19841008 200312 1 003